



IZIN HOTEL

Pemkot: Masyarakat Jangan Skeptis Dulu

JOGJA—Pemkot Jogja meminta semua pihak tidak khawatir dengan dibukanya keran perizinan pendirian hotel di Jogja.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Pasalnya, aturan perizinan hotel dalam Perwal No. 85/2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel akan diberlakukan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis).

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan Perwal yang mengatur pemberian izin pembangunan hotel khusus untuk bintang empat dan lima adalah bagian dari perpanjangan moratorium. Termasuk kemungkinan hotel yang ada ingin mengembangkan ke hotel bintang empat dan lima.

Asalnya sesuai aturan. "Perwal ini harus dilihat sebagai perpanjangan moratorium. Sebab yang dibuka dan dicekualikan hanya untuk izin hotel bintang empat dan lima," katanya, Jumat (4/1).

Hingga kini, kata Haryadi, belum ada investor yang memasukkan permohonan izin pembangunan hotel bintang empat dan lima. Dia juga berharap masyarakat tidak buru-buru skeptis terhadap dibukanya investasi khusus hotel bintang empat dan lima itu. "Kami akan siapkan [juklak-juknis] untuk mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin membangun hotel bintang empat dan lima," ucap Wali Kota.

Persyaratan yang dimaksud, kata dia, seperti luasan lahan, luas kamar, fasilitas hotel, lahan parkir, penggunaan sumber air dan aturan lain.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Untuk juklak-juknis, kemungkinan pertengahan Februari akan kami terbitkan."

Haryadi Suyuti
Wali Kota Jogja



Pemkot: Masyarakat...

"Untuk juklak-juknis, kemungkinan pertengahan Februari akan kami terbitkan. Semua akan kami atur sesuai ketentuan yang berlaku. Bukan seolah-olah, dibuka secara bebas, tapi ada aturannya," ujar dia.

Haryadi mengatakan Perwal tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan industri pariwisata di Kota Jogja. Dia juga berharap agar industri wisata di Jogja bisa berkembang dan sesuai kebutuhan. Apalagi sebentar lagi bandara baru NYIA akan beroperasi.

Peneliti Senior Pusat Studi Pariwisata (Puspas) UGM, Muhammad Baiquni menyarankan agar investasi untuk pembangunan hotel diarahkan ke beberapa wilayah di luar Kota Jogja seperti Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.

"Bandara baru di Kulonprogo sebentar lagi akan beroperasi. Tentunya, wilayah tersebut membutuhkan tambahan fasilitas seperti hotel untuk mendukung pengembangan pariwisata," kata dia.

Dengan begitu, lanjut dia, pertumbuhan hotel baru tidak selalu terjadi di Jogja saja tetapi juga merata di kabupaten lain di DIY. Hal ini juga membutuhkan keterlibatan dan kebijakan dari Pemda DIY agar investor bisa membangun hotel secara merata di Kabupaten Kulonprogo atau di Gunungkidul.

Selain itu, Puspas juga meminta Pemkot untuk mengevaluasi kembali seluruh izin hotel yang diterbitkan guna memastikan bahwa investor mematuhi aturan yang berlaku.

"Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan supaya kualitas dan pelayanan yang diberikan oleh hotel ini sudah sesuai dengan standar atau belum?" katanya.

Baiquni juga menyoroti tentang arsitektur hotel yang dinilai kurang mengindahkan aspek budaya tradisional sehingga tidak menonjolkan ciri khas Jogja.

"Jika nanti ada izin yang diberikan untuk pembangunan hotel baru, maka pemerintah daerah perlu memastikan bahwa arsitektur bangunan harus mencerminkan budaya Jogja," katanya.

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi

PM dan Perizinan

Netral

segera

Antuk

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005